

Manajemen Strategi Kebijakan Publik Sektor Pariwisata di Bali pada Masa Covid-19

Strategic Management of the Public Policy of the Tourism Sector in Bali during the Covid-19 Period

¹⁾Gine Das Prena, ^{2*)}Anasthasia Marsha Baru

¹⁾Dosen Pembimbing PKL Kelompok 22, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

²⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pendidikan Nasional

Jl. Bedugul No. 39, Sidakarya, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali

*email: anastasyamarsha05@gmail.com

DOI:

10.30595/jppm.v6i2.8071

Histori Artikel:

Diajukan:

06/08/2020

Diterima:

08/08/2022

Diterbitkan:

13/09/2022

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya baik akan keindahan alam, dan juga budayanya. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu destinasi tujuan untuk pariwisata yang cukup potensial. Selama masa pandemic, pendapatan di bidang pariwisata mengalami penurunan yang begitu signifikan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk membuat manajemen strategi kebijakan yang dapat membantu sektor pariwisata untuk tetap bertahan di masa pandemic. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis manajemen strategi kebijakan publik sektor pariwisata pada masa pandemic COVID-19. Berdasarkan analisis dan pembahasan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan manajemen strategi kebijakan publik di bidang pariwisata pada masa pandemic COVID-19. Kebijakan itu dirumuskan melalui Pemerintah Pengganti UUD RI Nomor 1 Tahun 2020, yang dikenal dengan sembilan kebijakan utamanya. Selain kebijakan Undang-undang tersebut, terdapat kebijakan yang memang dikhususkan kepada pariwisata khususnya di masa new normal ini.

Kata kunci: Pariwisata; Pandemic COVID-19; Manajemen Strategi Kebijakan Publik

ABSTRACT

Indonesia is a country that is rich in both natural beauty, as well as culture. This leads to Indonesia being one of the destination destinations for potential tourism. During pandemic time, revenues in tourism experienced a significant decline. Therefore, the Government strives to make policy management strategies that can help the tourism sector to stay afloat in the pandemic. Based on the problems, the authors are interested in analyzing the management of the tourism sector's public policy strategy in the pandemic COVID-19. Based on analysis and discussion. Based on the results and discussion, it can be concluded that the Government has been conducting public policy strategy management in tourism in the period of pandemic COVID-19. The policy was formulated through the successor Government of UUD RI number 1 year 2020, which is known as nine main policies. In addition to the policies of the law, there is a policy that is devoted to tourism especially in this normal new period.

Keywords: Tourism; Pandemic Covid-19; Management Strategy Public Policy

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya baik akan keindahan alam, dan juga budayanya. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu destinasi tujuan untuk pariwisata yang cukup potensial. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Pariwisata inilah yang memberikan devisa yang cukup besar bagi dunia pariwisata. Dengan sektor ini, Indonesia dapat meningkatkan kegiatan pembangunan, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan lain sebagainya jika dilaksanakan secara maksimal. Untuk mencapai maksimal ini, diperlukan sarana dan prasarana dalam sebuah objek wisata untuk dapat menarik wisatawan agar terus berkunjung ke Indonesia. Pariwisata ini datur dalam UU No. 10 Tahun 2009 mengenai kepariwisataan yang menjelaskan bahwa berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

Alistair Speirs, Chairman Superbands, pada diskusi Heritage Tourism di Yogyakarta tanggal 17 desember 2010, mengungkapkan bahwa pariwisata merupakan industri yang memberikan pendapatan terbesar peringkat satu atau dua di beberapa negara di dunia. Pariwisata adalah sebuah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimesi sosial, budaya, alam, dan ilmu.

Pariwisata memberikan banyak manfaat, baik dari segi ekonomi, budaya, politik, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, dan dari segi peluang dan kesempatan kerja. Dari segi ekonomi, Pariwisata bisa menghasilkan devisa bagi Negara sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu Negara (Yoeti, Oka .A. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita). Dari segi budaya, Membawa sebuah pemahaman dan pengertian anatar budaya dengan cara lewat interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata tersebut berada. Sehingga dari segi interaksi inilah para wisatawan dapat menegenal dan juga menghargai budaya masyarakat setempat dan juga latar belakang

kebudayaan lokal yang dianut oleh masyarakat tersebut (Yoeti, Oka .A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa).

Salah satu daerah yang ramai akan kunjungan wisatawan adalah provinsi Bali. Pariwisata Bali ini sudah terkenal baik di Indonesia maupun mancanegara. Daya tarik wisata Bali sangat beraneka ragam itu meliputi tempat wisata bali, kesenian tradisional, adat istiadat, arsitektur tradisional khas Bali, dan juga tentunya alam trofis. Pariwisata bali berkembang akibat dari nilai estetika, seni budaya yang mayoritas beragama Hindu. Masyarakat Bali juga sangat dikenal akan keramahatamahannya kepada orang lain. Kelebihan-kelebihan ini menyebabkan satu kesatuan yang padu menjadi daya tarik bagi wisatawan domestic dan juga mancanegara.

Namun, penurunan kunjungan ke Bali menurun drastis seiring dengan munculnya penyakit baru COVID-19 dan WHO telah menetapkan penyakit tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Di dunia saat ini wabah tersebut menyerang hampir seluruh negara. Menurut Alodokter (2020) *Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang merupakan pengembangan dari wabah SARS dan MERS. Virus ini memiliki tanda dan gejala umum infeksi *COVID-19* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat.

Dampak virus COVID-19 terjadi diberbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata dan pendidikan. Di bidang pariwisata tentunya membuat pendapatan hotel dan tempat wisata menurun drastis akibat banyak penerbangan yang mengalami penutupan dan negara yang di karantina. Pekerja pariwisatapun mengalami dampak yang begitu besar. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk membuat kebijakan yang dapat membantu sektor pariwisata untuk tetap bertahan di masa pandemic.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis Manajemen Strategi Kebijakan Publik Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemic COVID-19.

Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah:

1. Untuk melatih Praktikan untuk dapat memiliki mental yang kuat, tidak mudah menyerah dan menjadi tenaga kerja yang professional.
2. Untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi kebijakan public sektor pariwisata di Bali pada masa covid-19

METODE

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode kualitatif berupa analisis karna dasar pembuatan jurnal ini dilihat dari hasil observasi, dimana datanya berupa data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan peraturan tersebut, dari segi pariwisata, yang paling berpengaruh adalah penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE); perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Tentunya hal ini memberikan masyarakat peringanan terutama dari segi usaha, sehingga perusahaan, UMKM, ataupun usaha lainnya dapat tetap bertahan akibat dari pengeluaran yang berkurang dari segi pajak.

Kemudian kebijakan publik lainnya pada sektor pariwisata adalah yang pertama adalah pembukaan pariwisata di daerah yang memiliki tingkat penularan atau R0 dibawah angka 1. Hal ini tentunya sangat membantu beberapa daerah yang memiliki ketergantungan dan ciri khas bidang pariwisata. Namun, kasus COVID-19 di Indonesia masih terlampaui tinggi. Beberapa daerah yang membuka wisata bahkan tidak masuk ke dalam kriteria yang disebutkan oleh pemerintah. Di daerah Bali pun masih memiliki penambahan kasus tiap harinya

yang cukup signifikan. Hal ini menyebabkan jika pembukaan akan dilaksanakan, maka harus dibuatkan Standar Operasional Prosedur yang sangat ketat.

Kemudian yang kedua adalah setiap tempat wisata juga harus melalui berbagai tahapan mulai dari menyusun standar operasional prosedur, melakukan stimulasi, sosialisasi, hingga uji coba. Hal-hal persiapan ini tentunya membantu pelaku pariwisata untuk menyiapkan yang terbaik bagi para wisatawan yang hendak berkunjung, sehingga para wisatawan merasa lebih aman ketika melakukan kepariwisataan.

Selanjutnya yang ketiga adalah berwisata menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Dengan penerapan peraturan ini dengan ketat terutama dari pelaku pariwisata dan para wisatawan tentunya akan membuat kegiatan pariwisata menjadi lebih aman dan meminimalisir terjadinya kluster penyebaran COVID-19 yang baru. Hal ini juga membantu pelaku pariwisata dalam menimbulkan kepercayaan bagi para wisatawan, bahwa tempat wisata mereka telah memperhatikan protocol kesehatan.

Kebijakan berikutnya yang keempat adalah pemberian subsidi listrik dan air bersih, bunga dan restrukturisasi kredit, serta subsidi pajak. Hal-hal ini tentunya membantu keuangan pariwisata yang mengalami penurunan pendapatan yang begitu signifikan. Kebijakan ini dapat membantu pelaku pariwisata menurunkan biaya operasional tempat wisata tersebut. Hal ini membantu tempat pariwisata tetap bertahan di masa pandemic.

Pemerintah juga berencana untuk memberikan subsidi pendidikan pariwisata. Hal ini sangat diperlukan terutama di daerah dengan pendapatan terbesar di bidang pariwisata. Banyak masyarakat Bali yang sumber utama pemasukkannya adalah pariwisata, sehingga kemungkinan besar akan terjadi permasalahan pendidikan bagi anak-anak mereka yang juga bersekolah di sekolah pariwisata.

Selanjutnya adalah penguatan SOP mitigasi pariwisata. Dengan penegasan ini, tentunya segala Standar Operasional Prosedur mitigasi pariwisata dapat menjadi hal yang bisa menjadi jaminan bagi para wisatawan untuk tidak khawatir melakukan wisata ke tempat

mereka. Hal ini juga dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 di tempat wisata.

Kebijakan selanjutnya adalah penguatan regulasi masuknya wisatawan mancanegara dengan tujuan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 melalui *imported case*. Regulasi ini tentunya juga membantu tempat pariwisata akan tempat mereka selalu aman, dan tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Selain itu, analisis kebijakan yang terakhir adalah promosi wisata Indonesia dengan menunjukkan standar kebersihan, dan keamanan di Indonesia. Kebijakan terakhir ini tentunya sangat membantu pelaku pariwisata untuk memberikan branding terutama Indonesia yang telah membuka pariwisata namun tetap dengan protocol kesehatan yang ketat.

Kebijakan-kebijakan diatas tentunya memberikan harapan pada pihak pelaku pariwisata untuk tetap bertahan di tengah pandemic COVID-19. Kebijakan di masa *new normal* ini membantu pelaku pariwisata di berbagai sisi, baik dari segi keuangan, kebijakan, promosi, dan lain sebagainya. Dengan adanya kebijakan tersebut, pelaku pariwisata dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah diformulasikan secara maksimal, sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan manajemen strategi kebijakan publik di bidang pariwisata pada masa pandemic COVID-19. Kebijakan itu dirumuskan melalui Pemerintah Pengganti UUD RI Nomor 1 Tahun 2020, yang dikenal dengan sembilan kebijakan utamanya. Berdasarkan peraturan tersebut, dari segi pariwisata, yang paling berpengaruh adalah penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE); perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka

penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Tentunya hal ini memberikan masyarakat peringatan terutama dari segi usaha, sehingga perusahaan, UMKM, ataupun usaha lainnya dapat tetap bertahan akibat dari pengeluaran yang berkurang dari segi pajak. Selain kebijakan Undang-undang tersebut, terdapat kebijakan yang memang dikhususkan kepada pariwisata khususnya di masa *new normal* ini, seperti pembukaan pariwisata dengan daerah tingkat penularan R0 atau dibawah 1, tempat wisata melalui berbagai tahapan seperti menyusun SOP, melakukan stimulasi, sosialisasi hingga uji coba, berwisata menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan, subsidi listrik, air bersih, bunga restrukturisasi kredit, dan subsidi pajak. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan beberapa kebijakan lain seperti subsidi pendidikan pariwisata, penguatan SOP mitigasi pariwisata, penguatan regulasi masuknya wisatawan mancanegara, dan promosi wisata Indonesia. Kebijakan ini tentunya dapat membantu pariwisata untuk tetap bertahan di masa pandemic.

DAFTAR PUSTAKA

- AloDokter. 2020. *Virus Corona (COVID-19)*. <https://www.alodokter.com/virus-corona>
- Anggit, I. 2019. *Gubernur BI Jelaskan Pentingnya Pariwisata Bagi Ekonomi RI*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190318165757-4-61379/gubernur-bi-jelaskan-pentingnya-pariwisata-bagi-ekonomi-ri>
- Anonim. UU Nomor 10 Tahun 2009 *Tentang Kepariwisataan*
- Dewi, Maya Safira., Hana Setiawati. 2010. *Analisis Dampak Perubahan UU Pajak Penghasilan Terhadap Besarnya Pajak Penghasilan Pada PT JAJ*. <https://media.neliti.com/media/publications/167610-ID-analisis-dampak-perubahan-uu-pajak-pengh.pdf>
- Ihsanuddin. 2020. *9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi COVID-19*

*Penangguhan Cicilan hingga
Relaksasi Pajak.*

Kemenkeu.go.id. 2020. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020).* <https://kemenkeu.go.id/media/14999/faq-perppu-1-2020.pdf>

Kompas.com. 2010. *Speirs: Indonesia Kaya Objek Wisata.* <https://travel.kompas.com/read/2010/12/07/21280952/Speirs>

Maxmanroe.com. 2019. *Manajemen Strategi: Pengertian, Tujuan, dan Manfaatnya dalam Bisnis.* <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-manajemen-strategi.html>

Satriawan, Y. 2020. *Kiat Pariwisata Bertahan di Tengah Pandemi.* <https://www.voaindonesia.com/a/kiat-pariwisata-bertahan-di-tengah-pandemi/5412782.html>